

siSUPER (SPAK, SKM, HARIAN) | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Satker / Kode TL	Periode Tahun	Tindak Lanjut	Aksi																				
1	PENGADILAN NEGERI SINGKIL TL-098608-IKM-BF5FFD9B44	Triwulan I 2024	<p>TINDAK LANJUT HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGADILAN NEGERI SINGKIL KELAS II PERIODE JANUARI S/D MARET TAHUN 2024</p> <p>A. Latar Belakang Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Singkil maka telah dilakukan tindak lanjut.</p> <p>B. Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya; Buku IV Tentang Pengawasan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>C. Hasil Tindak Lanjut Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, telah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diantaranya:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian Pembahasan Tindak Lanjut</th> <th>Target Penyelesaian</th> <th>Penanggung Jawab</th> <th>Tgl. Penyelesaian/ status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada periode Januari s/d Maret 2024 terdapat 3 unsur nilai terendah dari pelayanan publik diantaranya : Unsur U1 yaitu : Persyaratan Unsur U1 berkaitan dengan Persyaratan. Program/ kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki unsur pelayanan publik tersebut dengan membuat informasi tentang layanan publik pada masing-masing bidang PTSP dalam bentuk brosur dan ceklist.</td> <td>April 2024</td> <td>Kepaniteraan Muda Hukum</td> <td>Sudah dibuat brosur dan ceklist tentang layanan publik pada masing-masing bidang.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Unsur U2 yaitu : Prosedur Unsur U2 berkaitan dengan Prosedur. Program/ kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki unsur pelayanan publik tersebut dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi Standar Operasional dan Prosedur (SOP)</td> <td>April 2024</td> <td>Kepaniteraan Muda Hukum</td> <td>Sudah dilakukan monitoring SOP terkait Prosedur pelayanan publik</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Unsur U3 yaitu : Waktu Pelayanan Unsur U3 berkaitan dengan Waktu Pelayanan. Program/ kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki unsur pelayanan publik tersebut dengan membuat informasi mengenai waktu penyelesaian pengurusan dokumen.</td> <td>April 2024</td> <td>Kepaniteraan Muda Hukum</td> <td>Sudah dibuat informasi mengenai waktu penyelesaian layanan.</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Uraian Pembahasan Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian/ status	1.	Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada periode Januari s/d Maret 2024 terdapat 3 unsur nilai terendah dari pelayanan publik diantaranya : Unsur U1 yaitu : Persyaratan Unsur U1 berkaitan dengan Persyaratan. Program/ kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki unsur pelayanan publik tersebut dengan membuat informasi tentang layanan publik pada masing-masing bidang PTSP dalam bentuk brosur dan ceklist.	April 2024	Kepaniteraan Muda Hukum	Sudah dibuat brosur dan ceklist tentang layanan publik pada masing-masing bidang.	2.	Unsur U2 yaitu : Prosedur Unsur U2 berkaitan dengan Prosedur. Program/ kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki unsur pelayanan publik tersebut dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi Standar Operasional dan Prosedur (SOP)	April 2024	Kepaniteraan Muda Hukum	Sudah dilakukan monitoring SOP terkait Prosedur pelayanan publik	3.	Unsur U3 yaitu : Waktu Pelayanan Unsur U3 berkaitan dengan Waktu Pelayanan. Program/ kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki unsur pelayanan publik tersebut dengan membuat informasi mengenai waktu penyelesaian pengurusan dokumen.	April 2024	Kepaniteraan Muda Hukum	Sudah dibuat informasi mengenai waktu penyelesaian layanan.	Pilih Detil
No.	Uraian Pembahasan Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian/ status																				
1.	Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada periode Januari s/d Maret 2024 terdapat 3 unsur nilai terendah dari pelayanan publik diantaranya : Unsur U1 yaitu : Persyaratan Unsur U1 berkaitan dengan Persyaratan. Program/ kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki unsur pelayanan publik tersebut dengan membuat informasi tentang layanan publik pada masing-masing bidang PTSP dalam bentuk brosur dan ceklist.	April 2024	Kepaniteraan Muda Hukum	Sudah dibuat brosur dan ceklist tentang layanan publik pada masing-masing bidang.																				
2.	Unsur U2 yaitu : Prosedur Unsur U2 berkaitan dengan Prosedur. Program/ kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki unsur pelayanan publik tersebut dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi Standar Operasional dan Prosedur (SOP)	April 2024	Kepaniteraan Muda Hukum	Sudah dilakukan monitoring SOP terkait Prosedur pelayanan publik																				
3.	Unsur U3 yaitu : Waktu Pelayanan Unsur U3 berkaitan dengan Waktu Pelayanan. Program/ kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki unsur pelayanan publik tersebut dengan membuat informasi mengenai waktu penyelesaian pengurusan dokumen.	April 2024	Kepaniteraan Muda Hukum	Sudah dibuat informasi mengenai waktu penyelesaian layanan.																				
2	PENGADILAN NEGERI SINGKIL TL-098608-IKM-7D23CCA2A5	Triwulan II 2023	<p>TINDAK LANJUT HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGADILAN NEGERI SINGKIL KELAS II PERIODE APRIL S/D JUNI TAHUN 2023</p> <p>Latar Belakang Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Singkil maka telah dilakukan tindak lanjut.</p> <p>Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya; Buku IV Tentang Pengawasan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>1. Hasil Tindak Lanjut Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, telah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	Pilih Detil																				

No.	Satker / Kode TL	Periode Tahun	Tindak Lanjut	Aksi
			<p>diantaranya: No. Uraian Pembahasan Tindak Lanjut Target Penyelesaian Penanggung Jawab Tgl. Penyelesaian/ status 1. Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada periode April s/d Juni 2023 terdapat 3 unsur nilai terendah dari pelayanan publik diantaranya : Unsur U1 yaitu : Persyaratan Unsur U1 berkaitan dengan Persyaratan. Program/ kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki unsur pelayanan publik tersebut dengan membuat informasi tentang pengajuan persyaratan masing-masing bidang. Juli 2023 Kepaniteraan Muda Hukum Sudah ada informasi terkait persyaratan layanan masing-masing bidang. 2. Unsur U2 yaitu : Prosedur Unsur U2 berkaitan dengan Prosedur. Program/ kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki unsur pelayanan publik tersebut dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Juli 2023 Kepaniteraan Muda Hukum Sudah dilakukan monitoring SOP terkait Prosedur pelayanan publik 3. Unsur U3 yaitu : Waktu Pelayanan Unsur U3 berkaitan dengan Waktu Pelayanan. Program/ kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki unsur pelayanan publik tersebut dengan membuat informasi mengenai waktu penyelesaian pengurusan dokumen. Juli 2023 Kepaniteraan Muda Hukum Sudah dibuat informasi mengenai waktu penyelesaian layanan.</p>	
3	PENGADILAN NEGERI SINGKIL TL-098608-IKM-236E592D79	Triwulan I 2023	<p>TINDAK LANJUT HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGADILAN NEGERI SINGKIL KELAS II PERIODE JANUARI S/D MARET TAHUN 2023 Latar Belakang Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Singkil maka telah dilakukan tindak lanjut. Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya; Buku IV Tentang Pengawasan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 1. Hasil Tindak Lanjut Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, telah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diantaranya: No. Uraian Pembahasan Tindak Lanjut Target Penyelesaian Penanggung Jawab Tgl. Penyelesaian/ status 1. Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada periode Januari s/d Maret 2023 terdapat 3 unsur nilai terendah dari pelayanan publik diantaranya : Unsur U4 yaitu : Biaya/Tarif Unsur U4 berkaitan dengan Biaya/Tarif. Program/ kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki unsur pelayanan publik tersebut dengan melakukan sosialisasi masif bahwa pengurusan dokumen pengadilan itu sudah tertera dan sesuai ketentuan PP No 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. April 2023 Kepaniteraan Muda Hukum Sudah dilakukan sosialisasi mengenai ketentuan tarif PNBP sesuai dengan PP No 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. 2. Unsur U3 yaitu : Prosedur Unsur U3 berkaitan dengan Prosedur. Program/ kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki unsur pelayanan publik tersebut dengan</p>	Pilih Detil

No.	Satker / Kode TL	Periode Tahun	Tindak Lanjut	Aksi
			<p>melaksanakan monitoring dan evaluasi Standar Operasional dan Prosedur (SOP) April 2023 Kepaniteraan Muda Hukum Sudah dilakukan monitoring SOP terkait Prosedur pelayanan publik 3. Unsur U8 yaitu : Waktu Pelayanan Unsur U8 berkaitan dengan Waktu Pelayanan. Program/ kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki unsur pelayanan publik tersebut dengan membuat informasi mengenai waktu penyelesaian pengurusan dokumen. April 2023 Kepaniteraan Muda Hukum Sudah dibuat informasi mengenai waktu penyelesaian layanan.</p>	
4	PENGADILAN NEGERI SINGKIL TL-098608-IKM-444436F0FE	Triwulan IV 2023	<p>INDAK LANJUT HASIL SUSRVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGADILAN NEGERI SINGKIL KELAS II PERIODE OKTOBER S/D DESEMBER TAHUN 2023 Latar Belakang Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Singkil maka telah dilakukan tindak lanjut Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Buku IV Tentang Pengawasan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil Tindak Lanjut Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, kemudian telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut Nilai tertinggi dari hasil survey adalah pada unsur : No Uraian Pembahasan Tindak Lanjut Target Penyelesaian Penanggung Jawab Tgl. Penyelesaian/status 1 Pemaparan hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat dan hasil analisis data yang telah dilakukan diperoleh nilai survey kepuasan masyarakat sebesar 97,66 % berada pada kategori " Sangat Baik". Nilai tertinggi dari hasil survey adalah pada unsur : U9 = Sarana dan Prasaran Pelaksana Nilai terendah dari hasil survey adalah pada unsur: U1 = Persyaratan Hasil tindak lanjut atas survey kepuasan masyarakat Waktu Pelayanan: Memberikan layanan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan sesuai dengan S.O.P tentang Pelayanan; Persyaratan : Agar Petugas Menjelaskan Produk Layanan yang akan diberikan kepada Pengguna Layanan Januari 2024 Kepaniteraan Muda Hukum 2 U4 = Biaya/Tarif Biaya Tarif : Agar petugas menyesuaikan produk layanan yang di berikan kepada pengguna layanan. 3 U8 = Penanganan Pengaduan Penanganan Pengaduan: Agar petugas diberikan bimbingan atau pelatihan terkait dengan tupoksi dari pada petugas Tentang Penanganan Pengaduan</p>	Pilih Detil
5	PENGADILAN NEGERI SINGKIL TL-098608-IKM-EB174DCAAF	Triwulan IV 2021	<p>TINDAK LANJUT HASIL SUSRVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGADILAN NEGERI SINGKIL KELAS II PERIODE OKTOBER S/D DESEMBER TAHUN 2021 Latar Belakang Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Singkil maka telah dilakukan tindak lanjut Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Buku IV Tentang</p>	Pilih Detil

No.	Satker / Kode TL	Periode Tahun	Tindak Lanjut	Aksi
			<p>Pengawasan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil Tindak Lanjut Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, kemudian telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut Nilai tertinggi dari hasil survey adalah pada unsur : No Uraian Pembahasan Tindak Lanjut Target Penyelesaian Penanggung Jawab Tgl. Penyelesaian/status</p> <p>1 Pemaparan hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat dan hasil analisis data yang telah dilakukan diperoleh nilai survey kepuasan masyarakat sebesar 92,11 % berada pada kategori "Baik". Nilai tertinggi dari hasil survey adalah pada unsur : U9 = Sarana dan Prasaran Pelaksana Nilai terendah dari hasil survey adalah pada unsur: U3 = Waktu Pelayanan Hasil tindak lanjut atas survey kepuasan masyarakat Waktu Pelayanan: Memberikan layanan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan sesuai dengan S.O.P tentang Pelayanan; Januari 2022 Kepaniteraan Muda Hukum</p> <p>2 U5 = Produk layanan Produk layanan : Agar petugas menyesuaikan produk layanan yang di berikan kepada pengguna layanan. 3</p> <p>U6 = Kompetensi Pelaksana Kompetensi Pelaksana: Agar petugas diberikan bimbingan atau pelatihan terkait dengan tupoksi dari pada petugas</p> <p>Demikian hasil tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kepaniteraan Muda Hukum agar dijadikan acuan dalam kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Singkil ke depan.</p>	